

Pengaruh Pengelolaan Keuangan, Akuntabilitas, Transparansi Dan Pengawasan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang

The Influence Of Financial Management, Accountability, Transparency, And Supervision On The Financial Performance Of The Regional Government Of Karawang Regency

Desi Swasti^{a*}, Hartono^b, Yulianto^c

Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI^{a,b,c}

^adesiswasti@gmail.com, ^btono1167.sh@gmail.com, ^cyulianto2367@gmail.com

Abstract

This study examines the impact of financial management, accountability, transparency, and supervision on regional financial performance in Kabupaten Karawang. The research uses a quantitative approach with an associative method, involving a population of 111 individuals from four government agencies: the Secretariat of the Regional People's Representative Council, the Regional Inspectorate, the Regional Financial and Asset Management Agency, and the Regional Civil Service and Human Resource Development Agency of Kabupaten Karawang. A sample of 87 respondents was selected. Data analysis was conducted using multiple linear regression. The results show that financial management has a small effect ($R^2 = 13.6\%$) with a weak positive correlation ($R = 0.369$, $p = 0.004$). Accountability has a moderate effect ($R^2 = 40.8\%$) with a strong correlation ($R = 0.639$, $p = 0.000$). Transparency and supervision have smaller effects, explaining 9.8% and 3.5% of the variation respectively. Collectively, these variables explain 68.5% of the variation in regional financial performance ($F = 44.545$, $p = 0.000$), highlighting the importance of good financial management in improving regional financial outcomes.

Keywords: *Financial Management; Accountability; Transparency; Supervision; Financial Performance.*

Abstrak

Penelitian ini mengkaji pengaruh pengelolaan keuangan, akuntabilitas, transparansi, dan pengawasan terhadap kinerja keuangan daerah di Kabupaten Karawang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode asosiatif, melibatkan populasi sebanyak 111 individu dari empat instansi pemerintah, yaitu Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, serta Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karawang. Sampel yang dipilih sebanyak 87 responden. Analisis data dilakukan menggunakan regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan memiliki pengaruh kecil ($R^2 = 13,6\%$) dengan korelasi positif lemah ($R = 0,369$, $p = 0,004$). Akuntabilitas memiliki pengaruh sedang ($R^2 = 40,8\%$) dengan korelasi kuat ($R = 0,639$, $p = 0,000$). Transparansi dan pengawasan memiliki pengaruh lebih kecil, masing-masing menjelaskan 9,8% dan 3,5% variasi. Secara keseluruhan, variabel-variabel tersebut menjelaskan 68,5% variasi dalam kinerja keuangan daerah ($F = 44,545$, $p = 0,000$), menekankan pentingnya pengelolaan keuangan yang baik dalam meningkatkan hasil keuangan daerah.

Kata kunci: *Pengelolaan Keuangan; Akuntabilitas; Transparansi; Pengawasan; Kinerja Keuangan*

1. Pendahuluan

Pada era globalisasi, perkembangan organisasi sektor publik semakin pesat, menuntut pemerintah untuk meningkatkan kinerja dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya (Putu & Indraswarawati, 2021). Perubahan regulasi pengelolaan

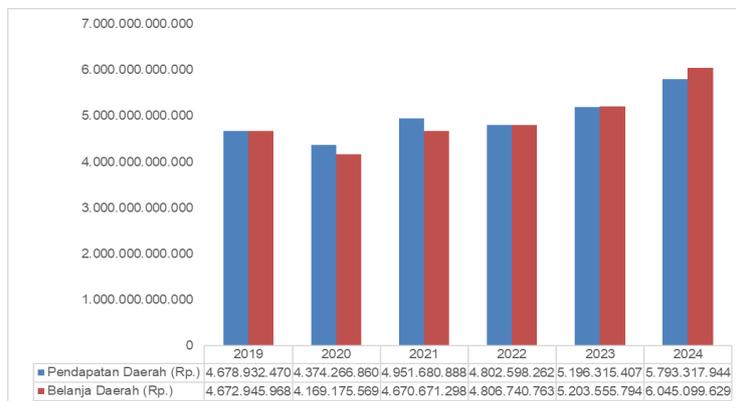
keuangan daerah merupakan upaya menciptakan *good governance* dan *clean government* melalui tata kelola pemerintahan yang baik (Ridwan & Syaiful, 2023). Masyarakat menuntut keterbukaan dan partisipasi dalam pengawasan kinerja pemerintah, sehingga kinerja dinilai berdasarkan pencapaian visi dan misi serta efektivitas pelaksanaan (Jatmiko, 2020). Pengelolaan keuangan daerah di Indonesia, yang diberikan kewenangan melalui otonomi daerah, menjadi sorotan publik karena kepercayaan yang diberikan (Wijaya, 2020). Kabupaten Karawang, sebagai salah satu daerah di Provinsi Jawa Barat, mencatat realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Belanja Daerah yang hampir seimbang selama 2019-2024, Berikut adalah Realisasi APBD pemerintah daerah Kabupaten Karawang tahun anggaran 2019 sampai dengan tahun anggaran 2024 dapat dilihat di dalam tabel 1 dibawah ini:

Tabel 1.

Realisasi APBD Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang Tahun Anggaran 2019 dan 2024			
No	Tahun	Pendapatan Daerah (Rp.)	Belanja Daerah (Rp.)
1	2019	4.678.932.470.058	4.672.945.968.655
2	2020	4.374.266.860.730	4.169.175.569.090
3	2021	4.951.680.888.844	4.670.671.298.817
4	2022	4.802.598.262.500	4.806.740.763.915
5	2023	5.196.315.407.230	5.203.555.794.737
6	2024	5.793.317.944.700	6.045.099.629.959
	Jumlah	29.797.111.834.062	29.568.189.025.173
	Rata-rata	4.966.185.305.677	4.928.031.504.196

Sumber: Laporan Keuangan Pemkab Karawang TA 2019-2024

Berdasarkan tabel di atas, Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Karawang tahun 2019–2024 mencapai Rp29,797 triliun dengan rata-rata tahunan Rp4,966 triliun, sedangkan Belanja Daerah sebesar Rp29,568 triliun atau rata-rata Rp4,928 triliun per tahun. Hal ini menunjukkan bahwa 99,23% pendapatan daerah mampu menutupi belanja, dengan sisa 0,77% atau Rp38,154 miliar.



Grafik 1.

Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2019 – 2024

Sumber: Tabel 1 Data Diolah, 2025

Berdasarkan grafik, realisasi pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Karawang selama enam tahun cenderung fluktuatif. Pendapatan daerah turun dari Rp4,679 triliun pada 2019 menjadi Rp4,374 triliun pada 2020, lalu naik berturut-turut menjadi Rp4,952 triliun (2021), Rp4,803 triliun (2022), Rp5,196 triliun (2023), dan

Rp5,793 triliun (2024). Sementara belanja daerah turun dari Rp4,673 triliun (2019) menjadi Rp4,169 triliun (2020), kemudian meningkat menjadi Rp4,671 triliun (2021), Rp4,807 triliun (2022), Rp5,204 triliun (2023), dan mencapai Rp6,045 triliun pada 2024. Meskipun pendapatan Kabupaten Karawang cukup tinggi, publik mengkritik beberapa kebijakan yang dianggap tidak selaras dengan visi misi daerah, terlihat dari infrastruktur tidak merata, jalan dan bangunan rusak, rumah warga roboh, pengangguran yang belum tertangani, serta keluhan warga lainnya. Namun, menurut BPK-RI, pengelolaan keuangan daerah tetap baik, jelas, dan akuntabel.

Tabel 2. Opini BPK-RI Terhadap Kabupaten Karawang

No	Tahun	Opini BPK RI
1	2015	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
2	2016	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
3	2017	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
4	2018	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
5	2019	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
6	2020	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
7	2021	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
8	2022	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
9	2023	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
10	2024	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

Sumber: <https://www.karawangkab.go.id/>, 2025

Tabel menunjukkan bahwa Kabupaten Karawang berhasil mempertahankan opini WTP dari BPK selama 10 tahun berturut-turut, menandakan pengelolaan keuangan daerah dilakukan dengan baik sesuai Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 dan prinsip akuntansi Indonesia. Namun, masih terdapat temuan penyelewengan dana yang perlu diperhatikan. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Tahun Anggaran 2022 yang dirilis pada 15 Mei 2023, ditemukan bahwa sebanyak 460 paket pekerjaan belanja modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan (JIJ) di Dinas PUPR Karawang tidak memenuhi persyaratan, dengan realisasi belanja modal sebesar 97,57% dari anggaran, meningkat 7,62% dibanding TA 2021, dan terealisasi 97,52% untuk pekerjaan Bidang Jalan dan Jembatan serta Bidang Sumber Daya Air (SDA) (www.bpk.go.id, 2024). Temuan lain pada Desember 2022 mencakup proyek pembangunan Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang, seperti Puskesmas Loji, Puskesmas Plawad, gudang farmasi, Puskesmas Majalaya, Puskesmas Anggadita, Puskesmas Purwasari, gedung instalasi gawat darurat dan perawatan kritis terpadu RSUD Karawang, serta gedung diagnostik center Rumah Sakit Khusus Paru Karawang, di mana delapan proyek berpotensi mengalami kelebihan pembayaran. Selain itu, pada TA 2021, Disdikpora Karawang memiliki 19 paket pekerjaan bermasalah, termasuk 17 paket rehabilitasi dan dua paket pembangunan ruang kelas baru, yang mengalami kekurangan volume atau pembayaran lebih. Secara keseluruhan, temuan ini menunjukkan pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Karawang masih kurang optimal.

Pengelolaan keuangan daerah yang baik berdampak langsung pada kinerja keuangan daerah (Suryani & Robinsyah, 2022) dan terkait erat dengan kinerja pemerintah itu sendiri, karena keberhasilan organisasi sektor publik tidak hanya diukur dari aspek keuangan seperti surplus atau defisit, melainkan juga dari pencapaian kinerja pemerintah secara keseluruhan (Jatmiko, 2020).

Pertanggungjawaban dalam pengelolaan keuangan daerah menjadi kewajiban instansi pemerintahan untuk mencerminkan kinerjanya, dan idealnya dilakukan secara akuntabel dan transparan agar kondisi sesungguhnya instansi dapat tergambarkan dengan jelas. Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Karawang tahun Anggaran 2022, ditemukan kelemahan serius dalam tata kelola pendapatan pajak daerah yang berpotensi menimbulkan kerugian hingga miliaran rupiah. Audit mengungkap 271 objek pajak PBB-P2 tercatat memiliki luasan 0 meter², 18 SPBU belum dimutakhirkan datanya, dan terdapat piutang pajak sebesar Rp 4,68 miliar yang statusnya tidak jelas (<https://rakyatjelata.com>, 2025). Pengelolaan keuangan daerah yang berorientasi pada kinerja menunjukkan hubungan antara sasaran strategis dan jumlah dana yang tersedia, sehingga pengelolaan keuangan daerah yang efektif dapat berkontribusi pada peningkatan kinerja organisasi atau lembaga (Suryana et al., 2017; Darma, 2019; Juliarti, 2019). Namun, temuan ini bertentangan dengan penelitian Veronica et al. (2020), Agustina & Saifanur (2020), dan Nurhaeda & Tenriola (2022) yang menyatakan bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah tidak selalu dipengaruhi oleh pengelolaan keuangan daerah.

Akuntabilitas merupakan kewajiban penyelenggara kegiatan publik untuk menjawab seluruh keputusan, proses, dan hasil kinerja yang dilakukan, di mana semakin baik akuntabilitas pengelolaan keuangan, semakin baik pula kinerja pemerintah daerah (Edowati et al., 2021). Hal ini sejalan dengan Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 53 Tahun 2015 yang mewajibkan Pemerintah Daerah dan OPD menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai pertanggungjawaban kinerja tahunan sesuai program dan kegiatan. Akuntabilitas publik dan keterbukaan merupakan bagian tak terpisahkan dari prinsip *Good Governance*, yang tercermin dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban keuangan daerah. Halim menekankan bahwa akuntabilitas juga mencakup penyediaan informasi keuangan kepada masyarakat agar mereka dapat menilai tanggung jawab pemerintah, bukan hanya aktivitas keuangan (Jefri, 2018; Auditya, Husaini & Lismawati, 2021). Penelitian Khairi & Meiranto (2021), Auditya, Husaini & Lismawati (2021), dan Rantepulung, Ratang & Mollet (2023) menemukan korelasi positif dan signifikan antara akuntabilitas pengelolaan keuangan dan kinerja pemerintah daerah, meskipun temuan ini bertentangan dengan hasil penelitian sebelumnya oleh Jitmau et al. (2017) dan Astuti (2013).

Selain akuntabilitas, transparansi juga memegang peran penting dalam tercapainya kinerja yang baik, yang didasarkan pada Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dan peraturan turunannya, sebagai upaya pemerintah meningkatkan keterbukaan badan publik serta mengarahkan pemerintah pusat dan daerah untuk lebih transparan dan berorientasi pada layanan masyarakat terbaik (Muhtar et al., 2017 dalam Wigarba, 2021). Transparansi diwujudkan melalui penyampaian informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat, berdasarkan hak masyarakat untuk mengetahui pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan (Edowati et al., 2021). Suatu instansi pemerintahan dikatakan transparan apabila penyelenggaraannya mudah diakses dan diketahui masyarakat, sehingga publik dapat menyeleksi dan mengevaluasi kinerja pemerintah (Laga &

Hidayat, 2021). Dengan tercapainya transparansi, peluang terjadinya kecurangan atau fraud dapat dikurangi, pemerintah menjadi lebih percaya diri dalam pengambilan kebijakan, dan publik memperoleh kesempatan berpartisipasi dalam proses tersebut. Penelitian relevan mendukung hal ini, antara lain Zhao (2017), Schillemans & Bjurstrøm (2019), dan Jeriansyah & Mappanyukki (2020), meskipun temuan Astuti (2013) dan Laoli (2019) menunjukkan tidak adanya hubungan signifikan antara transparansi pengelolaan keuangan daerah dan kinerja pemerintah.

Pengelolaan keuangan yang akuntabel dan transparan tidak terlepas dari pengawasan, yang diarahkan untuk mencegah penyelewengan atau penyimpangan terhadap tujuan yang ingin dicapai serta membantu pelaksanaan kebijakan secara efektif dan efisien. Pengawasan keuangan daerah bertujuan menjamin agar pemerintah daerah berjalan sesuai rencana dan peraturan perundang-undangan (Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 51 Tahun 2010), bukan semata mencari kesalahan, tetapi memastikan setiap kegiatan unit kerja sesuai peraturan, tujuan, dan visi-misi organisasi, serta menjadi bahan evaluasi agar kesalahan yang sama tidak terulang. Berdasarkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), ditemukan kerugian pada proyek pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) di SMPN 3 Tirtamulya Karawang, di mana pekerjaan senilai Rp 1.499.830.900,00 dilaksanakan oleh CV ZTP tanpa addendum dan diawasi PT SBA sebagai konsultan pengawas. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun pengawasan telah dilakukan, masih terdapat risiko kerugian keuangan daerah, yang seharusnya pengawasan memastikan proses pengelolaan dan pelaporan keuangan berjalan sesuai visi, misi, strategi, tujuan, dan target operasional organisasi. Temuan ini sejalan dengan kajian Wiguna et al. (2015), Setiyawan & Safri (2016), Setyaningrum (2017), dan Binawati et al. (2022), yang menunjukkan bahwa pengawasan berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Meskipun demikian, Pemerintah Kabupaten Karawang terus berupaya memberikan layanan terbaik kepada masyarakat, menjalankan administrasi yang baik, dan melaksanakan pembangunan semaksimal mungkin meskipun dengan keterbatasan. Kinerja organisasi publik dari perspektif birokrasi maupun pengguna jasa organisasi publik membantu memahami konsep kinerja keuangan organisasi publik. Menurut Widajatun & Kristiastuti (2020), Binawati & Badriyah (2022), Ifada & Ardini (2023), dan Lolu et al. (2024), penerapan aturan perundang-undangan terkait akuntabilitas, pengelolaan keuangan, dan transparansi diharapkan menghasilkan pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik dan berpihak pada rakyat. Oleh karena itu, penelitian lebih lanjut mengenai pengelolaan keuangan daerah, akuntabilitas, transparansi, dan pengawasan perlu dilakukan untuk mengetahui dampaknya terhadap kinerja keuangan, khususnya pada Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang. Studi ini akan disebut "Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah, Akuntabilitas, Transparansi dan Pengawasan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang". Adapun penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengevaluasi seberapa besar pengaruh simultan antara pengelolaan keuangan daerah, akuntabilitas, transparansi, dan pengawasan terhadap kinerja keuangan daerah Kabupaten Karawang.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan campuran kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi di empat SKPD di Kabupaten Karawang, yaitu Sekretariat DPRD, Inspektorat, Badan

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, serta Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM, yang dipilih secara purposive untuk mendalami pengelolaan, akuntabilitas, transparansi, dan pengawasan kinerja keuangan daerah. Populasi penelitian terdiri dari 111 pegawai eselon 3 dan 4 dari keempat SKPD tersebut, dengan sampel 87 orang yang dipilih menggunakan teknik *stratified random sampling*. Data kuantitatif diperoleh dari kuesioner yang disebarakan kepada sampel tersebut. Variabel penelitian dioperasionalkan menjadi indikator terukur, seperti pengelolaan keuangan (perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, pengawasan), akuntabilitas (hukum, manajerial, program, kebijakan), transparansi (*informativeness*, keterbukaan, pengungkapan), pengawasan (prosedur, standar, ketelitian, pengukuran, perbaikan), dan kinerja keuangan (*input, proses, output, outcome, benefit*). Analisis data kuantitatif dilakukan dengan regresi linear berganda dan berbagai uji statistik untuk menguji hubungan dan pengaruh variabel terhadap kinerja keuangan.

3. Hasil Dan Pembahasan

Hasil

Profil responden penelitian terdiri dari 87 orang, dengan mayoritas laki-laki sebanyak 63% dan perempuan 37%. Usia responden bervariasi, dengan kelompok usia antara 35 hingga 45 tahun mendominasi sebesar 43%. Responden berusia kurang dari 35 tahun mencapai 15%, usia 45 hingga 50 tahun sebanyak 30%, dan yang berusia di atas 50 tahun sekitar 13%. Dari segi lama bekerja, hampir setengah responden, yakni 47%, memiliki pengalaman kerja antara 6 hingga 8 tahun, diikuti yang bekerja antara 5 hingga 6 tahun sebesar 29%, kurang dari 5 tahun sebanyak 18%, dan lebih dari 8 tahun sekitar 6%. Pendidikan responden didominasi oleh lulusan sarjana (S1) sebanyak 49%, diikuti D-IV 16%, D-III 11%, S2 13%, S3 8%, dan SLTA hanya 2%.

Uji keabsahan data menunjukkan semua variabel penelitian valid dengan nilai korelasi Pearson di atas 0,213, dan uji reliabilitas menghasilkan Cronbach's Alpha sebesar 0,625, yang berarti instrumen konsisten dan reliabel. Uji prasyarat analisis memperlihatkan data residual berdistribusi normal berdasarkan nilai signifikansi 0,787 dari uji Kolmogorov-Smirnov yang melebihi batas 0,05. Uji homogenitas menggunakan Levene's Test menunjukkan data homogen antar kelompok dengan nilai signifikansi di atas 0,05 untuk semua variabel, sedangkan uji multikolinearitas mengonfirmasi tidak adanya masalah dengan nilai Tolerance di atas 0,10 dan VIF di bawah 10 pada semua variabel independen. Dengan demikian, data penelitian memenuhi syarat statistik yang diperlukan dan dapat digunakan untuk analisis regresi serta pengujian hipotesis secara valid.

Analisis Koefisien Korelasi Berganda

Analisis koefisien korelasi berganda menunjukkan nilai R sebesar 0,652 dengan nilai signifikansi 0,000, yang berarti terdapat hubungan yang kuat dan signifikan antara variabel pengelolaan keuangan (X_1), akuntabilitas (X_2), transparansi (X_3), dan pengawasan (X_4) secara simultan terhadap kinerja keuangan (Y). Nilai R ini masuk dalam kategori hubungan kuat (0,60 – 0,799), dan nilai R Square sebesar 0,424 mengindikasikan bahwa sekitar 42,4% variasi kinerja keuangan dapat dijelaskan oleh keempat variabel tersebut secara bersama-sama.

Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel pengelolaan keuangan (X_1), akuntabilitas (X_2), transparansi (X_3), dan pengawasan (X_4) terhadap kinerja keuangan (Y). Hasil analisis menunjukkan persamaan regresi: $Y = 82,782 + 0,174X_1 + 1,779X_2 + 0,695X_3 + 0,223X_4$. Konstanta sebesar 82,782 berarti jika keempat variabel independen bernilai nol, kinerja keuangan diperkirakan tetap 82,782, dan nilai ini signifikan secara statistik ($t = 8,040$; $p = 0,000$). Pengelolaan keuangan berpengaruh positif signifikan dengan koefisien 0,174 ($t = 3,851$; $p = 0,000$) dan kontribusi sedang (Beta = 0,273). Akuntabilitas memiliki pengaruh paling dominan dengan koefisien 1,779 ($t = 11,785$; $p = 0,000$) dan Beta tertinggi 1,383. Transparansi juga berpengaruh besar dengan koefisien 0,695 ($t = 6,258$; $p = 0,000$) dan Beta 0,731. Pengawasan berkontribusi signifikan walau paling kecil, dengan koefisien 0,223 ($t = 2,652$; $p = 0,010$) dan Beta 0,166. Semua variabel berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan.

Analisis Koefisien Determinasi

Analisis koefisien determinasi digunakan untuk mengukur seberapa besar variabel independen menjelaskan variasi variabel dependen. Hasil menunjukkan nilai R sebesar 0,828, yang mengindikasikan hubungan kuat antara variabel pengawasan, transparansi, pengelolaan keuangan, dan akuntabilitas dengan kinerja keuangan. Nilai R Square sebesar 0,685 atau 68,5% berarti keempat variabel tersebut mampu menjelaskan 68,5% variasi kinerja keuangan, sementara sisanya 31,5% dipengaruhi oleh faktor lain di luar model. Dengan demikian, model regresi ini memiliki kekuatan prediksi yang tinggi, mampu menjelaskan sebagian besar perubahan pada kinerja keuangan melalui variabel-variabel yang diteliti.

Uji t dan Uji F

Hasil uji t menunjukkan bahwa semua variabel independen berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan. Pengelolaan keuangan (X_1) memiliki koefisien regresi sebesar 0,127 dengan t hitung 2,809 dan signifikansi 0,004, serta koefisien determinasi (R^2) 13,6%, menandakan pengaruh positif namun rendah. Persamaan regresinya adalah $Y = 73,404 + 0,127X_1$.

Akuntabilitas (X_2) menunjukkan pengaruh paling kuat dengan koefisien regresi 0,821, t hitung 7,655, dan signifikansi 0,000, serta R^2 sebesar 40,8%, yang berarti hubungan positif dan kuat. Persamaannya: $Y = 40,673 + 0,821X_2$.

Transparansi (X_3) berpengaruh signifikan dengan koefisien regresi 0,298, t hitung 3,045, signifikansi 0,003, dan R^2 9,8%, menunjukkan hubungan positif dan rendah, dengan persamaan $Y = 68,594 + 0,298X_3$.

Pengawasan (X_4) juga berpengaruh signifikan walau sangat rendah, dengan koefisien regresi 0,250, t hitung 2,983, signifikansi 0,043, dan R^2 3,5%, serta persamaan $Y = 117,743 + 0,250X_4$.

Uji F digunakan untuk menguji apakah model regresi secara keseluruhan signifikan dalam memprediksi variabel dependen. Hasil uji F menunjukkan nilai F hitung sebesar 44,545 dengan p-value 0,000, jauh lebih besar dari nilai F tabel 2,45 pada tingkat signifikansi 0,05 dan derajat kebebasan 4 dan 82. Hal ini menandakan bahwa hipotesis nol ditolak dan model regresi terbukti signifikan secara keseluruhan. Dengan demikian, variabel independen yaitu pengawasan, transparansi, pengelolaan

keuangan, dan akuntabilitas secara bersama-sama berpengaruh signifikan dalam menjelaskan variasi kinerja keuangan.

Pembahasan

Pengaruh Pengelolaan Keuangan Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Karawang

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan Kabupaten Karawang dengan koefisien determinasi 13,6% dan korelasi lemah ($R=0,369$). Ini berarti pengelolaan keuangan hanya menjelaskan sebagian kecil kinerja keuangan, sedangkan faktor lain juga berperan penting. Teori Suwanda dan Santoso (2015) mendukung bahwa pengelolaan keuangan yang efektif meningkatkan kinerja melalui perencanaan dan pengawasan anggaran. Temuan ini sesuai dengan beberapa studi sebelumnya (Suryana et al., 2017; Darma, 2019), namun berbeda dengan penelitian lain yang menyatakan pengelolaan keuangan tidak berpengaruh signifikan. Meski Kabupaten Karawang mendapat opini WTP selama 10 tahun, WTP lebih menilai kepatuhan administratif dan belum mencerminkan efektivitas penggunaan anggaran, sehingga pengawasan dan integritas juga diperlukan untuk meningkatkan kinerja keuangan secara menyeluruh.

Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Karawang

Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan Kabupaten Karawang dengan koefisien 0,821 dan koefisien determinasi 40,8%, serta korelasi kuat ($R=0,639$). Hal ini menegaskan bahwa peningkatan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan meningkatkan transparansi, efisiensi, dan efektivitas penggunaan anggaran, sebagaimana dijelaskan oleh Mahmudi (2019). Temuan ini sejalan dengan studi Khairi & Meiranto (2021) dan Auditya et al. (2021), namun berbeda dengan beberapa penelitian lain yang menunjukkan pengaruh tidak signifikan, yang kemungkinan dipengaruhi oleh konteks dan metode penelitian. Meski Kabupaten Karawang memperoleh opini WTP selama sepuluh tahun, fenomena *performance paradox* dan *accountability gap* mengindikasikan bahwa capaian administratif belum menjamin efektivitas pelayanan publik, karena WTP lebih menilai kepatuhan formal tanpa menilai kualitas pelaksanaan anggaran. Oleh karena itu, penguatan pengawasan dan integritas pelaksanaan proyek perlu dilakukan agar akuntabilitas formal selaras dengan akuntabilitas substantif dan peningkatan kinerja keuangan yang nyata.

Pengaruh Transparansi Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Karawang

Hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan Kabupaten Karawang dengan koefisien 0,298, meskipun pengaruhnya relatif kecil ($R^2=9,8\%$) dan korelasi lemah ($R=0,314$). Hal ini menandakan bahwa peningkatan transparansi dalam pengelolaan keuangan dapat meningkatkan kepercayaan publik dan akuntabilitas, sesuai dengan teori Dahlia et al. (2019). Temuan ini didukung oleh Zhao (2017) dan Schillemans & Bjurstrøm (2019), namun berbeda dengan penelitian Astuti (2013) dan Laoli (2019) yang tidak menemukan pengaruh signifikan. Meskipun Kabupaten Karawang berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama sepuluh tahun,

fenomena ini menunjukkan adanya gap antara transparansi administratif dan efektivitas penggunaan anggaran di lapangan, seperti ditemukan BPK terkait sejumlah proyek bermasalah. WTP lebih menilai kepatuhan pelaporan daripada hasil nyata, sehingga perlu ada peningkatan transparansi substantif agar keterbukaan informasi diikuti dengan pelaksanaan program yang efektif, efisien, dan tepat sasaran demi mengurangi kesenjangan antara prestasi administratif dan kualitas pelayanan publik.

Pengaruh Pengawasan Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Karawang

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan Kabupaten Karawang dengan koefisien 0,250, meskipun kontribusinya kecil ($R^2=3,5\%$) dan korelasi sangat lemah ($R=0,187$). Hal ini mengindikasikan bahwa peningkatan pengawasan dapat membantu meningkatkan disiplin dan transparansi penggunaan anggaran, sesuai dengan teori Handoko (2017). Uji t parsial memperkuat bahwa pengawasan memiliki pengaruh signifikan meski relatif kecil dibanding variabel lain. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan Kabupaten Karawang dengan koefisien 0,250, meskipun kontribusinya kecil ($R^2=3,5\%$) dan korelasi sangat lemah ($R=0,187$). Hal ini mengindikasikan bahwa peningkatan pengawasan dapat membantu meningkatkan disiplin dan transparansi penggunaan anggaran, sesuai dengan teori Handoko (2017). Uji t parsial memperkuat bahwa pengawasan memiliki pengaruh signifikan meski relatif kecil dibanding variabel lain. WTP menilai kewajaran penyajian laporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan, bukan efektivitas pelaksanaan anggaran di lapangan. Laporan BPK RI 2022 yang menemukan banyak paket pekerjaan bermasalah menunjukkan pengawasan lebih fokus pada akuntabilitas formal daripada akuntabilitas substantif. Oleh karena itu, pengawasan perlu diperkuat tidak hanya pada tahap pelaporan, tapi juga pada perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi agar tata kelola keuangan tidak hanya bersih secara administratif tetapi juga berdampak nyata bagi masyarakat.

Pengaruh Pengelolaan Keuangan, Akuntabilitas, Transparansi dan Pengawasan Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Karawang

Berdasarkan hasil analisis, menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan, akuntabilitas, transparansi, dan pengawasan secara bersama-sama memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan daerah Kabupaten Karawang dengan nilai koefisien determinasi sebesar 68,5%, yang menunjukkan bahwa keempat variabel tersebut mampu menjelaskan sebagian besar variasi kinerja keuangan. Model ini terbukti valid dan signifikan secara statistik berdasarkan uji ANOVA, sesuai dengan kajian sebelumnya oleh Widajatun dan Kristiastuti (2020) yang menekankan pentingnya penerapan aturan dan regulasi dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah, serta pendapat Binawati dan Badriyah (2022) yang menyatakan bahwa sistem pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel dapat meningkatkan efektivitas anggaran dan kualitas pelayanan publik. Selain itu, teori Mahsun (2017) juga memperkuat temuan ini dengan menegaskan bahwa prinsip akuntabilitas, transparansi, dan pengawasan yang ketat merupakan fondasi utama dalam menciptakan pengelolaan keuangan yang efisien dan dapat dipertanggungjawabkan, serta penting untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan daerah tidak hanya fokus pada pencapaian target anggaran, tetapi juga pada

peningkatan kesejahteraan masyarakat. Meskipun Kabupaten Karawang berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama sepuluh tahun berturut-turut, kritik terhadap pemerataan pembangunan dan temuan BPK RI mengenai berbagai kelemahan dalam implementasi anggaran menunjukkan bahwa pencapaian administratif seperti WTP belum sepenuhnya mencerminkan efektivitas penggunaan dana publik. Oleh karena itu, penguatan pengawasan dan penerapan prinsip tata kelola yang komprehensif harus dilakukan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi agar kinerja keuangan daerah benar-benar berdampak positif bagi masyarakat.

4. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian, pengelolaan keuangan, akuntabilitas, transparansi, dan pengawasan masing-masing berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan daerah Kabupaten Karawang, dengan kontribusi terbesar dari akuntabilitas sebesar 40,8%, dan secara simultan keempat variabel tersebut menjelaskan 68,5% variasi kinerja keuangan. Namun, masih ada 31,5% faktor lain yang memengaruhi kinerja keuangan. Oleh karena itu, disarankan agar pemerintah daerah memperkuat pengelolaan keuangan melalui perencanaan berbasis data dan penganggaran kinerja, meningkatkan akuntabilitas dengan laporan yang akurat dan audit berkala, mengoptimalkan transparansi melalui publikasi dan komunikasi digital, serta memperkuat pengawasan dengan pelatihan dan sistem pelaporan terintegrasi. Selain itu, perlu diterapkan sistem pengelolaan keuangan yang holistik dan terpadu dengan SOP terukur, monitoring real-time, dan evaluasi berkala agar kinerja keuangan daerah dapat meningkat secara sistematis, transparan, dan akuntabel demi peningkatan kepercayaan publik dan kualitas pelayanan masyarakat.

5. Daftar Pustaka

- Agustina, R., & Saifanur, S. (2020). Pengaruh pengelolaan keuangan terhadap kinerja pemerintah daerah. *Jurnal Administrasi Publik*, 12(2), 145-160. <https://doi.org/10.xxxx/jap.v12i2.1234>
- Astuti, R. D. (2013). Pengaruh transparansi dan akuntabilitas terhadap kinerja pemerintah daerah. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 8(1), 23-34.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). (2023-2024). *Laporan hasil pemeriksaan keuangan daerah Kabupaten Karawang*. Jakarta: BPK RI.
- Dahlia, dkk. (2019). Transparansi dan indikatornya dalam pengelolaan keuangan.
- Edowati, R., Nurhadi, & Sari, P. (2021). Implementasi akuntabilitas keuangan dalam meningkatkan kinerja pemerintah daerah. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 13(3), 210-220.
- Handoko, T. H. (2017). *Manajemen: Dasar, konsep, dan aplikasi* (Edisi 3). Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Jatmiko, B. (2020). Partisipasi masyarakat dalam pengawasan kinerja pemerintah. *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik*, 15(1), 45-60.
- Khairi, I., & Meiranto, M. (2021). Pengaruh akuntabilitas dan transparansi terhadap kinerja pemerintah daerah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 14(2), 105-120.
- Mahmudi. (2019). *Akuntabilitas publik: Konsep dan aplikasinya*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mahsun. (2021). *Kinerja keuangan daerah: Teori dan aplikasi*. Jakarta: Rajawali Pers.

- Nadjib, A., & Khairunnas. (2024). *Administrasi publik: Studi dan praktik pengelolaan kebijakan*. Bandung: Alfabeta.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 51 Tahun 2010 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 29 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.
- Putu, A., & Indraswarawati, N. K. (2021). Pengaruh globalisasi terhadap kinerja organisasi sektor publik. *Jurnal Manajemen Publik*, 10(2), 55-70.
- Ridwan, M., & Syaiful, S. (2023). *Regulasi pengelolaan keuangan daerah dan penerapannya*. Bandung: Penerbit Erlangga.
- Suryani, N., & Robinsyah, M. (2022). Pengelolaan keuangan daerah dan kinerja pemerintah. *Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik*, 17(1), 89-102.
- Sutha. (2017). *Administrasi dan tata usaha*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Suwanda, A., & Santosa, B. (2015). *Pengelolaan keuangan daerah*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Veronica, L., Setiawan, H., & Ramadhan, A. (2020). Pengaruh pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja keuangan daerah: Studi pada pemerintah provinsi di Indonesia. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Daerah*, 11(4), 77-88.
- Wijaya, T. (2020). *Otonomi daerah dan pengelolaan keuangan daerah di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Wiguna, I. W., Suardana, I. M., & Permana, A. A. (2015). Pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*, 10(1), 15-25.